



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Uang Proyek Tak Dibayar

BENGKULU, BE - Empat perwakilan dari 11 perusahaan yang melaksanakan pekerjaan proyek di Kabupaten Mukomuko mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Polda Bengkulu, Kamis (5/3). Kedatangan mereka untuk konsultasi terkait uang proyek tahun 2019 yang belum dibayarkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Mukomuko meski pekerjaan sudah diselesaikan 100 persen. Dijelaskan perwakilan perusahaan, Ruswanto, pihaknya terpaksa datang ke Polda Bengkulu untuk konsultasi dengan maksud ada jalan keluar terkait uang proyek yang belum dibayarkan. Karena sampai saat ini Pemkab Mukomuko belum memberikan kejelasan dan jaminan kapan uang proyek akan dibayarkan. Total ada 11 perusahaan uang proyeknya belum dibayarkan, nominalnya Rp 2,8 miliar.

"Total uang proyek yang belum dibayarkan Rp 2,8 miliar. Untuk itu kita konsultasi ke

Polda seperti apa arahan kedepan terkait masalah uang proyek yang belum dibayarkan tersebut," jelas Ruswanto.

Pihaknya juga tidak tahu kenapa Pemkab Mukomuko belum membayar uang proyek tersebut. Padahal perusahaan yang telah selesai mengerjakan proyek sudah melengkapi seluruhnya persyaratan administrasi untuk proses pencairan. Perusahaan semakin heran karena belum ada kejelasan dari Pemkab kapan uang

dibayarkan. Pemkab Mukomuko hanya mengatakan uang proyek akan dibayarkan pada APBD murni 2020 atau APBD perubahan 2020. Terlebih lagi Pemkab Mukomuko tidak menghendaki adanya surat pengakuan hutang.

"Karena tidak ada kejelasan akhirnya kami memutuskan datang ke Polda untuk konsultasi masalah ini. Semoga ada jalan keluarnya," pungkask Ruswanto.

Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno

SSos, MH membenarkan kedatangan kontraktor dari Kabupaten Mukomuko tersebut baru sebatas konsultasi. Karena masih konsultasi penyidik terlebih dulu mempelajari apa yang sudah disampaikan para kontraktor. Jika sudah memenuhi unsur pidana, baru disarankan untuk membuat laporan.

"Baru konsultasi, penyidik akan pelajari dulu keterangannya. Jika memang ada unsur pidana maka kita sarankan membuat laporan," pungkask Kabid Humas.(167)